

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS SOSIAL KOTA MATARAM**

Osi Kusumawati

Universitas Mataram

osikusumawati3@gmail.com

Animah

Universitas Mataram

animahmtr@unram.ac.id

Isnawati

Universitas Mataram

Isnawati.isna@unram.ac.id

***Abstract:** The purpose of this study is to analyze the effectiveness and efficiency of the anggaran belanja shipments at the Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2020. Deskriptif research is the focus of this investigation. Observation and documentation are used to gather data. The results of the study show that the effectiveness of the Dinas Sosial Kota Mataram in the 2016-2020 period has met the criteria for effectiveness. Efficacy levels over the course of the time show that the execution of the mission was particularly efficient in the years 2016 and 2019. There are some anggaran that can be taken into consideration when implementing a software. A modest amount of censorship can improve the performance of a well-executed software. Incorporating the findings of this study could serve as a springboard for Dinas Sosial Kota Mataram to articulate their concerns about the efficiency and effectiveness of their belanja outreach efforts.*

***Keywords:** Effectiveness, Efficiency, Budget*

1. PENDAHULUAN

Pekerja sektor publik sedang dilatih untuk mengenali dan menghargai kualitas, profesionalisme, dan nilai uang dalam semua yang mereka miliki melakukan. Di zaman sekarang ini, kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan sektor publik, khususnya di Indonesia, yang semakin sadar akan era baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk menciptakan wilayah yang perkasa dan dinamis, mata uang suatu wilayah perlu dimanipulasi, yang telah dampak signifikan pada nasib wilayah itu. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengalihan lahan harus dilakukan dengan cara yang tidak berkompromi nilai uang, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, jika tidak maka akan menggagalkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mengurangi jumlah pemilik tanah dan menaikkan ambang batas kemiskinan.

Permendagri No. 31 dari buku tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 digunakan untuk mengilustrasikan hal ini dengan menyatakan itu Kepala Daerah "marah" tentang pelaksanaan tugas Tujuan Pemerintah Daerah dan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai badan penasehat pemerintah Daerah Tujuan Daerah. DPRD bertanggung jawab atas hal ini. Sebagai bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah (DPRD), ada potensi untuk APBD yang akan dibahas, dinyatakan, dan dipraktikkan sebagai contoh strategi peluang internasional yang bertujuan di negara asing (Paat et al., 2019). Selain itu, APBD telah menyepakati komitmen pendanaan selama satu tahun untuk penyelenggaraan daerah, yang telah disetujui oleh gubernur kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah disebarluaskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten. Semua tujuan dan persyaratan pemerintah yang dapat dibeli dengan uang, termasuk semua jenis pengeluaran terkait dengan tujuan dan persyaratan rakyat negara, akan dihilangkan pada akhir tahun anggaran tahun (Sari et al., 2018).

Proses APBD harus mengikuti pedoman khusus, yang harus jelas dan terkait erat dengan pemenuhan mandat pemerintah dan efektif, efisien, tidak memihak, dan bermanfaat bagi masyarakat umum agar dapat berhasil. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 diterbitkan secara terpisah. APBD berfungsi sebagai Pemerintah Daerah acuan dalam menentukan sejauh mana Pemerintah telah mencapai efisiensi dan kemanjuran dalam upayanya melayani masyarakat daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dalam mengejar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan akuntabilitas di Lingkup Pemerintahan, APBD dapat dianggap sebagai mestinya sebagai mestinya (Paat et al., 2019).

Efisiensi dan Efektivitas digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu metode efektif jika dapat menyelesaikan tugas dengan langkah-langkah yang telah ditentukan; jika tidak, metode ini tidak efektif. Ini adalah kriteria efisiensi yang berfokus pada dimensi penggunaan sumber daya dari organisasi. Di bidang jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Mataram berfungsi sebagai Pemerintah Daerah di bentuk dari perangkat daerah, yang dibuat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pada perangkat daerah dan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Koomataram Nomor 15 tahun 2016 pada

perangkat Daerah Daerah Koomataram. Agar berhasil, pembangunan kedua struktur ini harus mempertimbangkan konsep-konsep efisiensi dan efektivitas.

Selain itu, Mataram Dinas Sosial memiliki Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2016 hingga 2020. Laporan Realisasi Anggaran Belanja akan menjadi subjek analisis apakah efektif atau tidak dan efektif.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2016	6.809.663.529	6.555.170.690	96.26
2017	6.254.572.186	5.959.605.354	95.28
2018	7.407.328.468	7.211.358.371	97.35
2019	7.445.697.686	7.160.092.510	96.16
2020	6.878.836.962	6.649.025.018	96.66

Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram, 2021

Tabel 1.1 rencana lima tahun yang menguraikan tujuan dan sasaran untuk pendirian Klub Sosial Kota Mataram, dengan masing-masing tahun dari 2016 hingga 2020 menjadi serangkaian tantangan dan kemunduran baru, Pada tahun 2016, harga real estat adalah Rp 96,26% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan tren ini berlanjut hingga 2017 saat masih Rp 95,28% lebih tinggi, dan tren ini berlanjut hingga 2019 ketika harga real estat Rp 96,16% lebih tinggi, dan tren ini Terus hingga tahun 2020

Ada sejumlah program yang sudah anggarkan, namun belum dilaksanakan atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada beberapa program yang telah dilaksanakan, tetapi mereka belum dilaksanakan atau dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal secara efisien agar untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat umum (Widiyana, 2016). Pelajaran terpenting yang dipetik dari kondisi perekonomian saat ini adalah perlunya dukungan pemerintah daerah di untuk mengembangkan alat khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berdasarkan kinematika aktual, daripada perubahan bertahap yang sangat lambat untuk berakar. Akibatnya, ketika menulis proposal hibah, penting untuk mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas hibah dalam mencapai tujuan dan sasaran hibah. Sebagai hasil dari ini, menetapkan standar yang jelas untuk pekerjaan proyek dan kampanye, serta menetapkan harga yang wajar, akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Andana, 2019).

Dengan dasar pemikiran itulah peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram**”.

Hasil dari penelitian ini mengikuti hasil dari yang dilakukan oleh (Sabrina, 2018) yang menemukan bahwa efektivitas keseluruhan tingkat untuk proyek belanja jangka panjang di Universitas Islam Raden Intan Lampung adalah 90 persen, Menyarankan bahwa seluruh proyek memenuhi kriteria keberhasilan (efektif). Hal ini didukung oleh peningkatan pendanaan yang lebih besar dari perkiraan, dan penelitian yang dilakukan oleh (S.Basariyah, 2009) juga menunjukkan bahwa pendanaan untuk BPMPD Daerah Prov.Sulteng telah berfluktuasi dari tahun ke tahun selama lima terakhir Tahun (total enam tahun). Pada 2011, tingkat efisiensi sekitar 77, 61 persen, tetapi dalam tiga tahun berikutnya, itu meningkat menjadi Masing-masing 84,66 persen, 85,03 persen, dan 89,34 persen. Namun, tingkat efisiensinya masih di bawah ambang batas efisien bpmpd di provinsi Sultan, meskipun peningkatan jumlah kasus aktual anggaran yang digunakan dan dianalisis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stakeholder

Teori pemangku kepentingan digunakan dalam teori besar penelitian ini. Pemangku kepentingan adalah mereka yang telah diidentifikasi dan dapat mempengaruhi tujuan pencapaian tertentu. Pemangku kepentingan penting dalam organisasi mana pun adalah investor, anggota dewan, karyawan, pelanggan, atau grup lain yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan bisnis. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses perluasan suatu wilayah, pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan cara yang seefisien mungkin. Ada kemungkinan bahwa kepemimpinan distrik tertentu dapat diturunkan dari kebijakan federal pemerintah sebagai sumber utama sumber daya berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk kabupaten tersebut. Penting untuk dicatat bahwa anggaran yang telah disahkan adalah bentuk dari apa yang dibutuhkan rakyat sehingga bahwa hasilnya akan kembali kepada mereka dalam bentuk kebutuhan dasar. Stakeholder Pemerintah Daerah (OPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbagi tanggung jawab untuk merespon hingga bencana alam di wilayah tersebut. Hal ini

terlihat dalam proses pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, sehingga tidak mengarah pada a interpretasi realitas skala kecil (Kennedy et al, 2020).

Akibatnya, keberhasilan bisnis atau organisasi apa pun secara langsung dipengaruhi oleh pembatasan yang diberlakukan oleh Pemangku Kepentingan pada bisnis atau organisasi itu. Sebagai pemangku kepentingan utama, pemerintah memiliki kepentingan dalam proses pengembangan wilayah tertentu dan diharapkan mampu melakukan pembangunan yang cepat sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Karakter suatu daerah tertentu dapat diperoleh dari cara pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Karena mereka mampu berkolaborasi dengan rakyat dalam rangka menggunakan kewenangan, pelayanan, dan strategi untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di daerah tersebut, tidak mudah untuk mendapatkan Memahami di atasnya. Penggunaan akronim dapat menghasilkan eksekusi akronim yang cepat dan ekonomis sampai akhir tahun (Ramadhani &Setiawan, 2019).

2.1.1. Efektivitas

Kemanjuran menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Ukuran efektivitas adalah cerminan dari produk. Proses kerja organisasi efisien jika, misalnya, ingin membangun gedung apartemen kecil dengan 250 ruang tidur, empat unit operasional, satu unit kecelakaan darurat, dan satu di luar pasien jika semua di atas target terpenuhi.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Eektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

2.1.2 Efisiensi

Agar efisien, harus ada aliran informasi dua arah yang konstan antara input dan output dari setiap yang diberikan proyek atau kegiatan. Jika suatu organisasi, program, atau kegiatan mampu memberikan hasil yang diinginkan dengan masukan yang baik serendah-rendah atau skala besar (belanja dengan bijak), disebut efisien (Arisandi, 2018).

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327. 2016

2.1.3 Pengukuran Kinerja

Anggaran pengukuran, sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 29 Tahun 2014, merupakan perbandingan antara pelaksanaan kinerja saat ini dengan target (asaran) dari kinerja yang didokumentasikan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja selama pelaksanaan APBN/APBD selama pelaksanaannya kursus tahunan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun E. Fatmala (2020) Judul studi: "Analisis Efektivitas dan Efektivitas dalam Anggaran dan Belanja (Studi Kasus) dari Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)" adalah subjek dari penelitian ini. Untuk keperluan penelitian ini, kami mencoba mempelajari efektivitas dan kemandirian Kantor Camat Pakue, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini digunakan teknik penulisan kuantitatif dan pengumpulan data seperti observasi dan survei. Penting untuk menggunakan data tingkat kedua, seperti nilai tukar mata uang dan database Kantor Camat Pakue. Sebagai hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa (1) efisiensi anggaran dan belanja di Kantor Camat Pakue terus meningkat dari tahun ke tahun, dan (2) kemandirian didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek berdasarkan jumlah uang yang dibutuhkan atau jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi itu.

I'm Sabrina (2018) "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Dalam Mewujudkan Anggaran Belanja Jangka Panjang di Universitas Islam di Raden Intan Lampung" adalah judul dari tulisan ini. Ini adalah metode kuantitatif dan deskriptif yang sedang digunakan. Ada dua jenis data: primer, yang digunakan untuk memeriksa data yang lebih mendasar, dan sekunder, yang digunakan untuk memeriksa data yang lebih spesifik, mencakup tahun 2013-2017. Karena nilai per-sentase berada di luar batas kriteria yang dapat diterima, hasil dari titik analisis hingga kegagalan untuk memenuhi kriteria belanja yang valid dalam jangka panjang. Namun, tingkat efisiensi antara 2013 dan 2017 telah memenuhi semua kriteria efektif. Sebaliknya, hasil analisis membandingkan proyeksi jangka panjang dengan hasil aktual selama bertahun-tahun 2013-2017 memenuhi kriteria "baik." Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sama-sama efektif dan efisien dalam hal mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya, tetapi ini tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

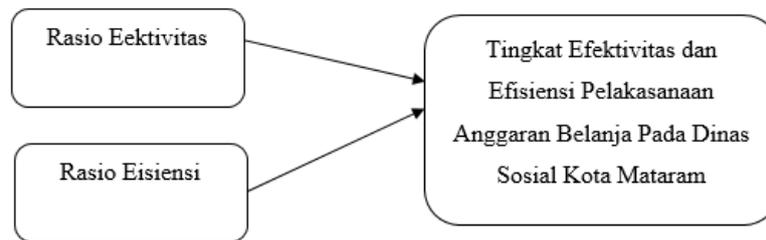
Laila dan rekan penulis (2019) Judul tulisan ini adalah "Analisis Anggaran yang Direalisasikan ke Tentukan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah Kinerja" Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, kami akan menggunakan metode analitik

deskriptif kualitatif yang melibatkan pengumpulan data, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan menganalisis variansnya untuk menentukan sumber masalah yang paling mungkin. Masa studi meliputi tiga tahun, dari 2016 hingga 2018. Hasil penelitian tentang tingkat efisiensi pada tahun 2016-2018 semuanya termasuk dalam kategori efektif karena hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi lebih tinggi dari 90%, yang baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil studi tentang tingkat efisiensi untuk tahun 2016-2018 semuanya termasuk dalam kategori "hanya sedikit efisien," yang disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja "jangka panjang" yang lebih besar daripada jumlah total dari belanja "real-time" yang digunakan.

Sari et al.,(2018) "Analisis efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan anggaran belanja" adalah judul tulisan ini. Dalam penelitian ini, jenis analisis yang digunakan adalah kuantitatif, dengan memanfaatkan metode komutatif kuantitatif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang batas atau kriteria untuk mengevaluasi efektivitas bantuan asing terhadap Pemerintah Kota Samarinda selama tahun 2011-2015 telah bervariasi. Ketika datang ke 2014, kriterianya lebih ketat, tetapi pada 2011, 2012, 2013, dan 2015, kriterianya kurang ketat karena tujuan keuangan yang diaktualisasikan berbeda secara signifikan dari tujuan keuangan yang dinyatakan. Lalu ada beberapa game, tetapi tidak diterapkan dengan cara yang efektif. Selama pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota 2011-2015 dengan efisiensi penuh. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Di sini peneliti membuat skema rerengkas yang mengisyaratkan identitas penelitiannya. Sebagai salah satu contoh dari data tersebut, Rasio Eektivitas menunjukkan penurunan efisiensi dan efektivitas yang signifikan pelaksanaan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Mataram, dan sebagai contoh lain, Rasio Efisiensi menunjukkan serupa penurunan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Mataram.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang akan saya lakukan. Dalam hal ini, status keuangan dan posisi Dinas Sosial Kota Mataram dianalisis, antara lain evaluasi efisiensi dan efektivitas pengolahan anggaran dari pihak Dinas Sosial Kota Mataram.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamatkan di Jl. RA Kartini No.03, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah selama tahun 2021.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode dokumentasi.

1. Metode Observasi

Ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat objek studi tertentu secara langsung. Untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan, maka perlu menggunakan metode ini karena mahasiswa adalah mampu menjelaskan, memahami, dan mengapresiasi konsep dari kejauhan (E.Fatmala, 2020).

Peneliti akan menggunakan metode ini dengan melakukan perjalanan ke lokasi belajar, yaitu Dinas Sosial Kota Mataram, perlahan dan sengaja.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dari dokumen yang ada atau sumber yang tidak berdokumen seperti coretan pada dinding (Melania et al., 2016). Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan cara-cara dalam yang mana tujuan suatu organisasi dapat diwujudkan dalam hal struktur keuangan dan organisasinya.

3.4 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document..3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Efektivitas Penilaian/ Pengukuran Kinerja	Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan	$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran Belanja}{Target Anggaran Belanja} \times 100\%$ <p>Kriteria Efektivitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% keatas sangat efektif 90% sampai 100% efektif 80% sampai 90% cukup efektif 60% sampai 80% kurang efektif Kurang dari 60% tidak efektif <p>(Bunna, 2021)</p>
Efisiensi Penilaian/ Pengukuran Kinerja	Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara yang digunakan, yang membandingkan input dengan output	$Efisiensi = \frac{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}{Realisasi Anggaran Belanja} \times 100$ <p>Kriteria Efisiensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% keatas tidak efisien 90% sampai 100% kurang efisien 80% sampai 90% cukup efisien - 60% sampai 80% efisien Kurang dari 60% sangat efisien <p>(Bunna, 2021)</p>

3.5 Prosedur Analisis Data

1. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya, Peneliti akan melakukan perhitungan terhadap Efektivitas maupun Efisiensi dari Belanja Dinas Sosial tersebut. Setelah

menemukan hasil dari perhitungan tersebut selanjutnya saya akan analisis dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

2. Analisis Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3. Analisis Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Instansi pemerintah di bidang jaminan sosial dan perangkat daerah berbasis mataram di Indonesia. Hal ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pada Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2016 tentang pengembangan dan pemanfaatan Perangkat Daerah. Sebelumnya dikenal sebagai Dinas Sosial, Energi, dan Migrasi Mataram.

Mengidentifikasi perkembangan sosial dan politik masyarakat sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka saat ini di iklim ekonomi saat ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan Peraturan Dewan Kota Mataram Tidak No. 38 tahun 2016 tentang pertumbuhan dan kemajuan organisasi. Dari segi desain dan fungsi, Dinas Sosial Kota Mataram diciptakan oleh Dinas Sosial.

4.1.2 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2016-2020

Tabel 4.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2016	6.809.663.529,00	6.555.170.690,00	96,26	Efektif
2017	6.254.572.186,00	5.959.605.354,00.	95,28	Efektif
2018	7.407.328.468,00	7.211..358.371,00.	97,35	Efektif
2019	7.445.697.686,00	7.160.092.510,00	96,16	Efektif

2020	6.878.836.962,00	6.649.025.018,00	96,65	Efektif
------	------------------	------------------	-------	---------

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2021)

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas, kita dapat melihat bahwa efektivitas program anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2016-2020 belum menunjukkan perubahan yang signifikan, dengan efektivitas kriterianya sama setiap tahunnya. Untuk penjelasan yang lebih detail, kita bisa melihat grafik dan teks yang menyertainya di bawah ini.

Grafik 4.2 Grafik Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik batang diatas analisis efektivitas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tingkat persentase efektivitas selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Yang dimana pada tahun 2018 tingkat persentase meningkat sebesar 97,35% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 95,28%. hal ini terjadi karena realisasinya yang sedikit dibandingkan dengan target anggaran belanja.

4.1.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2016-2020

Tabel 4.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
2016	5,727,890,690.00	6,555,170,690.00	87.38	Cukup Efisien
2017	4,694,696,604.00	5,959,605,354.00	78.78	Efisien
2018	5,235,298,671.00	7,211,358,371.00	72.60	Efisien
2019	5,796,164,010.00	7,160,092,510.00	81	Cukup Efisien
2020	5,028,621,118.00	6,649,025,018.00	75.63	Efisien

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2021)

Menurut statistik pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa efektivitas Dinas Sosial Kota Program Mataram Untuk Tahun 2016-2020 terus meningkat dan melampaui standar efisiensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, pada 2016, kriterianya sedikit buruk; pada tahun 2017, mereka sedikit gelisah; pada tahun 2018, mereka merasa nyaman; pada tahun 2019, mereka iffy; pada tahun 2020, mereka merasa nyaman. Untuk penjelasan lebih detail dapat kita lihat grafik serta penjelasan di bawah ini:

Grafik IV.2
Grafik Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2020



Pada tahun 2016, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2016 sebesar Rp. 6.555.170.690,00 dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.727.890.690,00 sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi Dinas Sosial Kota Mataram per 31 Desember 2016 sebesar 87,38% yang termasuk dalam katagori cukup efisien karena diatas 80%.

Pada tahun 2017, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2017 sebesar Rp 5.959.605.354,00 dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 4.694.696.604,00 sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi Dinas Sosial Kota Mataram per 31 Desember 2017 sebesar 78,78% yang termasuk Efisien karena diatas 60% sampai 80%.

Pada tahun 2018, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2018 sebesar Rp 7.211.358.371,00 dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 5.235.298.671,00 sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi Dinas Sosial Kota Mataram per 31 Desember 2018 sebesar 72,60% termasuk dalam katagori efisien karena diatas 60% sampai 80%.

Pada tahun 2019, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2019 sebesar Rp7.160.092.510,00 dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.5.796.164.010,00 sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi Dinas Sosial Kota Mataram per 31 Desember 2019 sebesar 81% termasuk dalam kategori cukup efisien karena diatas 80% .

Pada tahun 2020, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2018 sebesar Rp 6.649.025.018,00 dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp5.028.621.118,00 sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi Dinas Sosial Kota Mataram per 31 Desember 2018 sebesar 75,63% termasuk dalam katagori efisien karena diatas 60% sampai 80%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Milik Dinas Sosial Kota Mataram untuk tahun 2016-2020 dapat diartikan menunjukkan bahwa semua itu telah memenuhi kriteria efektivitas karena memiliki tingkat efisiensi 90 persen (Efektif) yang dapat diverifikasi oleh hasil penelitian dan diverifikasi terhadap kriteria standar untuk efektivitas. Dalam konteks ini, jelas bahwa target penerima anggaran sudah tepat dan mampu Menyadari anggaran yang diantisipasi target dibandingkan dengan target berdasarkan kemampuannya sendiri. Hal ini juga ditegaskan oleh anggaran perolehan yang lebih besar dari perkiraan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Sabrina, 2018) yang ditemukan bahwa anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki rat-a-rat efektivitas 90 persen (efektif). Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah awal pendanaan yang lebih besar dari perkiraan .

4.2.2 Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Mataram dari tahun 2016-2020 memiliki kriteria efisiensi yang bervariasi. Pada tahun 2016 anggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Mataram sebesar 87,38% memiliki kriteria cukup efisien. Tahun 2017-2018 anggaran belanja - 60% sampai 80% memiliki kriteria efisien, tahun 2019 anggaran belanja kembali masuk ke dalam kriteria cukup efisien dan pada tahun 2020 anggaran belanja kembali dalam kriteria efisien. Tahun 2020 mengalami kenaikan tingkat efisiensi yaitu jumlah rasio perhitungannya turun sebesar 75,63%. Walaupun terjadi penurunan anggaran belanja langsung pada tahun tersebut, Dinas Sosial Kota Mataram menunjukkan hasil yang maksimal karena dengan anggaran terbatas Dinas Sosial Kota Mataram masih terbilang mampu dalam menjalankan 41 program kegiatan.

Sebuah studi oleh (S.Basariyah, 2009) menemukan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja BPMPD Daerah Prov.Sulteng telah berfluktuasi dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Tingkat efisiensi adalah 77,6% pada tahun 2011, tetapi meningkat menjadi 84,6% pada tahun 2012, 85,3% pada tahun 2013, dan 89,34% pada tahun 2014, sementara jumlah orang yang benar-benar menggunakan dan mendapat manfaat dari teknologi meningkat. Namun, sebagian besar kenaikan tersebut terjadi pada kategori "efisien" di BPMPD di provinsi tersebut dari Sultan, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah orang yang benar-benar mendapat manfaat dari teknologi meningkat.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden No.690.900.327 Tahun 1996, yang menetapkan bahwa kriteria efektivitas keseluruhan untuk si anggaran belanja Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2016-2020 berada di angka 100%, karena per

persen tingkat efisiensi adalah 95 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa realitas situasinya sedikit berbeda dengan target anggaran belanja.

Kriteria efikasi, seperti metrik, juga dapat diturunkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 dari tahun 1996, yang menunjukkan bahwa metrik untuk menilai efektivitas Layanan Sosial Kota Mataram Departemen untuk tahun 2016-2020 sangat bervariasi. In 2016, kriteria efisiensinya cukup efisien, in 2017-2018 kriteria efisiensinya berada pada posisi efisien, in 2019 kriteria efisiensinya cukup efisien, dan in 2020 kriteria efisiensinya cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Mataram telah berhasil memenuhi ambang batas efisiensi penggunaan belanja sumbangan kecil dengan meluncurkan 41 proyek berbeda dan mampu mencapai hasil yang maksimal.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu penelitian ini tidak menggunakan indikator lain, hanya menggunakan dua rasio dalam pengukuran yaitu efektivitas dan efisiensi yang dapat dijadikan sebagai teknik pengukuran maupun analisis data.

5.3 Saran

1. Bagi Dinas Sosial Kota Mataram agar dapat lebih memperhatikan pengelolaan dan penyaluran dana itu sendiri, serta diharapkan para anggota yang bekerja pada Dinas Sosial Kota Mataram dapat berkoordinasi dengan masyarakat sehingga adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan.
2. Dinas Sosial Kota Mataram diharapkan dalam melakukan pengelolaan keuangan tetap mengacu pada undang-undang serta harus sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah wawancara dalam pengumpulan data agar dapat memperjelas data dan lebih memperdalam informasi yang didapatkan

DAFTAR PUSTAKA

Andana, R. R. D. (2019). Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri. *Angewandte Chemie International Edition*,

6(11), 951–952.

- Arisandi, S. (2018). *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Tahun 2012-2015*. Universitas Sriwijaya.
- Cici Sitti Hajaerah Bunna. (2021). *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*. Muhammadiyah.
- E.Fatmala. (2020). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kennedy et al. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117.
- Laila, A., Noor, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(7), 1–15.
- Melania, R., Grace, N., & Hendrik, M. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan DAerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 616–623.
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi PELaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 7(3), 2979–2988.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- S.Basariyah. (2009). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Daera Provinsi Sulawesi tengah. *Jurnal Katalogis*, 5(32), 63–74.
- Sabrina, D. (2018). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 571–585. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.159>
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38–43. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/4051/374>
- Widiyana, A. (2016). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai KInerja Pada Dinas Pendidikan , Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang* <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1394/1/SKRIPSI1191-1712094098.pdf>